



BPR KMI

SEBUAH SOLUSI PASTI

PT BPR KREDIT MANDIRI INDONESIA

LAPORAN TATA KELOLA

SEMESTER 2 (DUA) TAHUN 2025

BAB I PENJELASAN UMUM

PT BPR Kredit Mandiri Indonesia (selanjutnya disingkat “BPR KMI”) menyadari bahwa penerapan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) merupakan suatu keharusan demi menjaga kelangsungan usaha perusahaan dalam jangka panjang dan memaksimalkan nilai perusahaan.

Penerapan tata kelola perusahaan yang baik di BPR KMI ditujukan antara lain untuk:

- a. Mendukung visi BPR KMI, yaitu : “Menjadi Bank Komunitas yang dipercaya dalam kemitraan dengan masyarakat.”
- b. Mendukung misi BPR KMI, yaitu : “Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan komunitas dengan memberikan akses keuangan yang mudah.”
- c. Memberikan manfaat dan nilai tambah (added value) bagi para pemegang saham (shareholders) dan para pemangku kepentingan (stakeholders).
- d. Mempertahankan dan meningkatkan kelangsungan usaha yang sehat dan kompetitif dalam jangka panjang (sustainable).

Tata Kelola Perusahaan PT. BPR Kredit Mandiri Indonesia dilaksanakan dengan menerapkan prinsip-prinsip :

- a. Transparansi (Transparency) Merupakan keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.
- b. Akuntabilitas (Accountability) Merupakan kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.
- c. Pertanggungjawaban (Responsibility) Merupakan kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan Bank yang sehat.
- d. Independensi (Independence) Merupakan pengelolaan Bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun.
- e. Kewajaran dan Kesetaraan (Fairness) Merupakan keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Ringkasan Hasil Penilaian (Self Assessment) Atas Penerapan Tata Kelola

Nama BPR	PT. BPR KREDIT MANDIRI INDONESIA
Alamat	Jl Boulevard BSD Timur Blok AH 2 No 7, Rawa Buntu, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten 15310
Nomor Telepon	(021) 80634561
Posisi Laporan	31 Desember 2025
Peringkat Komposit	1
Predikat Komposit	Sangat Baik
Kesimpulan / Penjelasan	Manajemen BPR telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum sangat baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang sangat memadai atas prinsip tata kelola. Tidak terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola dan terdapat upaya manajemen yang berpotensi meningkatkan kinerja BPR. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh manajemen BPR.

BAB II

TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA BPR

A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi		
1.	Nama	:	Andy
	Jabatan	:	Direktur Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	a. Memimpin dan mengurus BPR KMI sesuai dengan Visi dan Misi BPR KMI b. Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan BPR KMI untuk kepentingan BPR KMI c. Menciptakan struktur pengendalian internal, menjamin terselenggaranya fungsi audit internal dalam setiap tingkatan manajemen dan menindaklanjuti temuan audit internal sesuai dengan kebijakan atau arahan yang diberikan Dewan Komisaris; d. Menyampaikan Rencana Kerja Tahunan yang memuat juga Anggaran Tahunan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang, dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku; e. Melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan (Good Corporate Governance) dalam setiap kegiatan usaha BPR KMI pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi f. Membuat Laporan Tahunan dan dokumen-dokumen perusahaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku; g. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Auditor Eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan/ atau hasil pengawasan otoritas lainnya; h. Memimpin, mengarahkan, dan mengkoordinasi pengembangan produk-produk funding dan memastikan bahwa pengembangan serta penawaran tersebut merupakan produk yang berkualitas dan berdaya saing tinggi. i. Mengarahkan dan menetapkan strategi dan kebijakan dengan memperhatikan, strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan. j. Mengawasi kelancaran kegiatan BPR KMI sesuai dengan strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan. k. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham. Mengungkapkan kepada karyawan Kebijakan yang bersifat strategis di bidang kepegawaian, antara lain berbagai kebijakan kepegawaian dalam berbagai Surat Keputusan yang dapat diakses seluruh karyawan, Website BPR KMI, kebijakan mengenai Sistem Recruitment, Sistem Promosi, Sistem Remunerasi melalui sarana yang diakses oleh Karyawan.		

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi		
2.	Nama	:	Darwhin Sinarta
	Jabatan	:	Direktur
Tugas dan Tanggung Jawab :			
a. Merumuskan dan mengimplementasikan strategi IT yang sejalan dengan visi dan misi BPR Kredit Mandiri Indonesia. b. Mengidentifikasi teknologi baru yang dapat memberikan keunggulan kompetitif bagi BPR Kredit Mandiri Indonesia. c. Mengawasi infrastruktur IT, termasuk perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, dan data center. d. Memastikan ketersediaan, keandalan, dan skalabilitas sistem IT. e. Mengembangkan kebijakan dan prosedur keamanan IT untuk melindungi data nasabah dan sistem bank. f. Memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan standar industri, seperti ISO 27001, PCI DSS, atau regulasi OJK (Otoritas Jasa Keuangan). g. Mengidentifikasi, menganalisis, dan memitigasi risiko yang berkaitan dengan teknologi. h. Menyusun rencana pemulihan bencana (disaster recovery plan) dan memastikan kesiapan operasional dalam situasi darurat. i. Memimpin pengembangan, pengujian, dan peluncuran sistem baru untuk mendukung operasional bank. j. Berkolaborasi dengan departemen lain untuk memastikan sistem memenuhi kebutuhan bisnis. k. Memimpin dan mengembangkan tim IT, termasuk perekrutan, pelatihan, dan evaluasi kinerja. l. Berkoordinasi dengan vendor, mitra teknologi, dan regulator. m. Mendorong inisiatif transformasi digital di seluruh bank. n. Memberikan laporan berkala kepada dewan direksi mengenai status, peluang, dan tantangan terkait teknologi. o. Mengawasi proyek-proyek IT strategis, termasuk integrasi teknologi dalam merger atau akuisisi. p. Menyediakan solusi yang mendukung pengalaman nasabah, seperti pengembangan layanan perbankan digital atau aplikasi mobile banking.			

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi		
3.	Nama	:	Suhendra
	Jabatan	:	Direktur
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	a. Memimpin dan mengurus BPR KMI sesuai dengan Visi dan Misi BPR Kredit Mandiri Indonesia. b. Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan BPR Kredit Mandiri Indonesia untuk kepentingan BPR Kredit Mandiri Indonesia. c. Bertanggung jawab dalam seluruh proses operasional. d. Menyusun strategi agar target perusahaan bisa tercapai. e. Melakukan pengecekan dan pengawasan kebutuhan terkait operasional perusahaan f. Membuat rencana, mengambil keputusan, dan berkoordinasi dengan bagian keuangan untuk memenuhi kebutuhan operasional perusahaan. g. Melakukan pengawasan dan memastikan setiap karyawan menjalankan tugas dengan baik h. Bertanggung jawab terhadap kinerja keuangan BPR Kredit Mandiri Indonesia. i. Bertanggung jawab membuat laporan keuangan BPR Kredit Mandiri Indonesia. j. Mengawasi laporan keuangan BPR Kredit Mandiri Indonesia. k. Menyusun strategi dan meningkatkan pertumbuhan keuangan BPR Kredit Mandiri Indonesia. l. Meminimalisir resiko keuangan yang mungkin merugikan perusahaan m. Menyampaikan Rencana Kerja Tahunan yang memuat juga Anggaran Tahunan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris n. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Auditor Eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan/ atau hasil pengawasan otoritas lain. o. Melaksanakan prinsip- prinsip tata kelola perusahaan (Good Corporate Governance) dalam setiap kegiatan usaha BPR Kredit Mandiri Indonesia pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi p. Mengarahkan, mengevaluasi, dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengurusan di bidang keuangan BPR Kredit Mandiri Indonesia. q. Mengarahkan, mengevaluasi, dan mengkoordinasikan unit kerja di bidang keuangan, serta berkoordinasi dengan Direktur lainnya.		

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi		
4.	Nama	:	Jemmy ST
	Jabatan	:	Direktur
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	a. Memimpin dan mengurus BPR Kredit Mandiri Indonesia sesuai dengan Visi dan Misi BPR Kredit Mandiri Indonesia. b. Merumuskan strategi bisnis jangka pendek, menengah, dan panjang yang sejalan dengan visi dan misi BPR Kredit Mandiri Indonesia. c. Mengidentifikasi peluang pasar baru dan memperluas portofolio produk dan layanan bank dan menetapkan target pertumbuhan pendapatan, pangsa pasar, dan profitabilitas. d. Menetapkan target pertumbuhan pendapatan, pangsa pasar, dan profitabilitas. e. Memastikan produk dan layanan sesuai dengan kebutuhan pelanggan, baik untuk segmen ritel, korporasi, maupun UMKM. f. Mendorong inovasi dalam pengembangan produk, termasuk adopsi teknologi terbaru. g. Mengelola hubungan dengan nasabah prioritas dan korporasi besar untuk memastikan loyalitas dan kepuasan pelanggan. h. Mengawasi operasional cabang dan memastikan pencapaian target penjualan di setiap wilayah. i. Mengawasi manajemen risiko terkait kegiatan bisnis untuk meminimalkan kredit bermasalah (NPL) dan risiko lainnya. j. Melakukan analisis kinerja bisnis secara berkala dan menyusun laporan untuk dewan direksi. k. Memimpin, membimbing, dan mengembangkan tim bisnis bank agar mampu mencapai target yang ditetapkan. l. Menyusun kebijakan insentif dan penghargaan untuk memotivasi karyawan. m. Memastikan semua aktivitas bisnis mematuhi regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan otoritas lainnya. n. Melakukan analisis pasar untuk memahami tren industri, kebutuhan pelanggan, dan perubahan perilaku konsumen. o. Mengawasi strategi pesaing dan menyesuaikan pendekatan bisnis bank untuk tetap kompetitif. p. Melakukan evaluasi strategi bisnis dan melakukan penyesuaian jika diperlukan untuk mencapai target yang diinginkan.		

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi		
5.	Nama	:	Lukman Nelam
	Jabatan	:	Direktur
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	a. Merumuskan kebijakan dan prosedur untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengelola risiko kredit. b. Memastikan bahwa portofolio kredit bank dikelola secara optimal untuk meminimalkan potensi kerugian. c. Menyusun strategi mitigasi risiko, termasuk diversifikasi portofolio kredit dan pengelolaan eksposur risiko d. Mengawasi proses analisis kelayakan kredit. e. Memastikan bahwa pengelolaan risiko kredit sesuai dengan regulasi yang berlaku, seperti ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). f. Mengawasi pengembangan sistem scoring kredit dan alat analisis risiko yang berbasis teknologi. g. Memastikan penerapan sistem IT yang mendukung pengelolaan risiko kredit secara efektif. h. Mengelola kredit bermasalah (non - performing loans/NPL) melalui negosiasi, restrukturisasi, atau tindakan hukum i. Memonitor proses penyelesaian sengketa kredit, baik secara litigasi maupun nonlitigasi (mediasi atau arbitrase). j. Memastikan bahwa proses litigasi dijalankan dengan mempertimbangkan perlindungan kepentingan bank. k. Menyusun strategi hukum yang proaktif untuk menghindari potensi sengketa kredit. l. Berkomunikasi dengan pengacara eksternal, penegak hukum, atau pihak lain yang terlibat dalam litigasi kredit. m. Berkoordinasi dengan regulator untuk memastikan proses litigasi sesuai dengan ketentuan. n. Memimpin tim manajemen risiko kredit dan tim litigasi, termasuk pengembangan keterampilan dan penilaian kinerja o. Mengarahkan tim untuk mencapai efisiensi dalam mitigasi risiko kredit dan penyelesaian litigasi. p. Menyusun laporan berkala tentang kinerja portofolio kredit, risiko yang dihadapi, serta status litigasi. q. Memberikan masukan kepada direksi terkait strategi risiko kredit dan kebijakan litigasi. r. Memastikan dapat mengelola risiko kredit secara efisien sekaligus meminimalkan dampak litigasi pada operasional dan reputasi BPR Kredit Mandiri Indonesia.		

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi		
6.	Nama	:	Dimas Purwita Kamajaya
	Jabatan	:	Direktur yang menjalankan fungsi kepatuhan
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	a. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank; b. Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip- prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi; c. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank; d. Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan & peraturan perundang-undangan yang berlaku. e. Meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank. f. Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/ atau keputusan yang diambil Direksi Bank tidak menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; g. Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkini dan peraturan perundang- undangan lain yang relevan; h. Melaporkan kepada anggota Direksi lainnya dan Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai BPR; dan i. Melapor kepada Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh Direktur BPR j. Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan k. Melakukan Hak dan kewajiban Direktur sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Perusahaan Terbatas, apabila untuk perbuatan- perbuatan tertentu tersebut diperlukan keputusan dari seluruh anggota Direksi Bank.		
Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris :			
	1. Lakukan pembatasan untuk industri yang berdampak tarif seperti sepatu, baju, furniture, peternakan udang. 2. Rasio NPL Gross 4,67%, NPL Nett 4,10% 3. Untuk bucket 31-60 sudah membaik 4. Dengan adanya perlakuan CKPN yang sangat berdampak besar bagi collection, diharapkan dapat dijaga flow collectionnya		

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris		
1.	Nama	:	Melvin Wangkar
	Jabatan	:	Komisaris Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	a. Memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip- prinsip tata kelola perusahaan (Good Corporate Governance) dalam setiap kegiatan usaha BPR KMI pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi b. Melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan BPR KMI, jalannya pengurusan pada umumnya, dan memberi nasihat kepada Direksi. Pengawasan oleh Dewan Komisaris dilakukan untuk kepentingan BPR KMI sesuai dengan Visi dan Misi BPR KMI. c. Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR KMI d. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Audit Internal, Auditor Eksternal, termasuk hasil pengawasan pihak otoritas namun tidak terbatas pada Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. e. Dewan Komisaris dapat meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai antara lain permasalahan, kinerja, dan kebijakan operasional BPR KMI. f. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan/ Bank Indonesia paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan, dan keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR KMI. g. Menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris, paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. Rapat Dewan Komisaris wajib dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris. h. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris, dan ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat Dewan Komisaris. i. Mendistribusikan salinan risalah rapat Dewan Komisaris kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan pihak yang terkait. j. Mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan		

2.	Nama	:	Handoko Kuarso
	Jabatan	:	Komisaris Independen
Tugas dan Tanggung Jawab :			
a. Memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip- prinsip tata kelola perusahaan (Good Corporate Governance) dalam setiap kegiatan usaha BPR KMI pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi b. Melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan BPR Kredit Mandiri Indonesia dan memberi nasihat kepada Direksi. Pengawasan oleh Dewan Komisaris dilakukan untuk kepentingan BPR KMI sesuai dengan Visi dan Misi BPR Kredit Mandiri Indonesia. Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR Kredit Mandiri Indonesia. c. Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR Kredit Mandiri Indonesia d. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Audit Internal, Auditor Eksternal, termasuk hasil pengawasan pihak otoritas namun tidak terbatas pada Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia e. Dewan Komisaris dapat meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai antara lain permasalahan, kinerja, dan kebijakan operasional BPR Kredit Mandiri Indonesia. f. Menilai kecukupan fungsi audit intern BPR Kredit Mandiri Indonesia, untuk menilai seluruh aspek kegiatan sesuai peraturan OJK dan perundang-undangan yang berlaku g. Mengkaji dan evaluasi atas kecukupan dari fungsi Audit Intern BPR KMI, termasuk jumlah auditornya, rencana kerja tahunan berikut anggarannya dan pekerjaan yang telah dilaksanakan. h. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan audit serta tindak lanjut hasil audit yang dilakukan oleh Manajemen dan Satuan Kerja Operasional/ Auditee terkait lainnya dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern. i. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan/ Bank Indonesia paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan, dan keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR KMI. j. Menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris, paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. Rapat Dewan Komisaris wajib dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris. k. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris, dan ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir			

3.	Nama	:	Rainald Okta Putra
	Jabatan	:	Komisaris Independen
Tugas dan Tanggung Jawab :			
a. Memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip - prinsip tata kelola perusahaan (Good Corporate Governance) dalam setiap kegiatan usaha BPR KMI pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. b. Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Melakukan evaluasi dan memberikan masukan kepada Dewan Komisaris tentang kecukupan, kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan. c. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko, serta melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait. d. Memastikan bahwa Direksi (Manajemen) telah melakukan pengawasan secara aktif. e. terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko. f. Menilai efektivitas dan kecukupan penerapan manajemen risiko sesuai dengan tujuan ukuran dan kompleksitas usaha serta risiko yang dihadapinya. g. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Audit Internal, Auditor Eksternal, termasuk hasil pengawasan pihak otoritas namun tidak terbatas pada Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. h. Dewan Komisaris dapat meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai antara lain permasalahan, kinerja, dan kebijakan operasional BPR KMI. i. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan/ Bank Indonesia paling lambat 7(tujuh) hari kerja sejak ditemukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan, dan keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR KMI. j. Menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris, paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. Rapat Dewan Komisaris wajib dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris. k. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris, dan ditandatangani anggota Dewan Komisaris yang hadir.			
Rekomendasi kepada Direksi			
1. Penurunan kualitas kredit, tumbuh dengan tingkat kehati-hatian 2. Fokus pada perbaikan kualitas jangan fokus dengan target dan lebih selektif 3. Hindari pinjaman-pinjaman dengan plafon tinggi 4. Likuiditas agar dijaga dengan baik 5. Penyaluran kredit yang berkualitas 6. Untuk training-training yang berbasis kompetensi harus ditingkatkan lagi, harus diukur kompetensinya dengan beberapa cara dan harus melibatkan cabang.			

3. Tugas, Tanggung Jawab, Program Kerja, dan Realisasi Program Kerja Komite

a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

No	Tugas dan Tanggung Jawab Komite
1.	Komite Audit
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	a. Melakukan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan Audit b. Merumuskan kebijakan Audit Perusahaan, termasuk spesifikasi Audit. c. Memastikan bahwa kebijakan Audit Perusahaan sesuai dengan regulasi terkait dengan Audit d. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dan Direksi terkait dengan Audit e. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perusahaan kepada publik dan/ atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan PT. BPR Kredit Mandiri Indonesia f. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perusahaan g. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya; h. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan fee i. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal j. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perusahaan k. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perusahaan dan l. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perusahaan

2.	Komite Pemantau Risiko Tugas dan Tanggung Jawab :
	a. Melakukan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan penerapan manajemen risiko b. Menilai efektivitas manajemen risiko termasuk menilai toleransi risiko yang dapat diambil oleh perusahaan c. Merumuskan kebijakan manajemen risiko perusahaan, termasuk spesifikasi risk appetite /risk tolerance. d. Memastikan bahwa kebijakan manajemen risiko perusahaan sesuai dengan regulasi terkait dengan manajemen risiko dan permodalan yang berlaku e. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dan Direksi terkait risk appetite f. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perusahaan. g. Komite Pemantau Risiko paling kurang melakukan: 1) Evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut; 2) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Manajemen Risiko; 3) Review laporan posisi risiko secara berkala dan upaya peningkatan litigasi risiko yang dilakukan oleh Bagian Manajemen Risiko maupun bagian/seksi yang menangani pengelolaan jenis risiko secara spesifik.
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi Tugas dan Tanggung Jawab :
	a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai: 1) Struktur Remunerasi; 2) Kebijakan atas Remunerasi; dan 3) Besaran atas Remunerasi; b. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris.

	c. Dalam memberikan rekomendasi terkait dengan kebijakan remunerasi Komite memperhatikan : 1) Kinerja keuangan 2) Peraturan perundang-undangan yang berlaku; 3) Prestasi kerja individual; 4) Kewajaran dengan peer group; dan 5) Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang.
--	--

b. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

No	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite		
1.	Komite Audit		
	Program	:	1. Audit IT akan lebih di pertajam pada scope pemeriksaan terkait keamanan informasi. 2. Melakukan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan Audit serta memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait dengan hasil laporan Audit.
	Realisasi	:	1. Komite selanjutnya akan melaporkan update perbaikan atas tindak lanjut temuan IT Pengadaan Sistem Elektronik. 2. Mengenai analisis tren audit rating akan disampaikan ke management sebagai dasar dari hasil pemeriksaan audit.
	Jumlah Rapat	:	2
2.	Komite Pemantau Risiko		
	Program	:	1. Mengenai analisis tren audit rating akan disampaikan ke management sebagai dasar dari hasil pemeriksaan audit.

			- Menilai dan memberikan rekomendasi perbaikan terhadap Profil Risiko, per jenis risiko, agar tetap berada dalam tingkat risiko yang dapat diterima. - Menilai dan memberikan rekomendasi penyempurnaan alat ukur serta mekanisme pemantauan risiko, termasuk Risk Rank dan RCSA. - Menilai kesiapan dan efektivitas Business Continuity Plan (BCP) dalam mendukung keberlangsungan operasional serta memberikan rekomendasi perbaikan apabila diperlukan.
	Realisasi	:	- Mengenai analisis tren audit rating akan disampaikan ke management sebagai dasar dari hasil pemeriksaan audit. Evaluasi efektivitas manajemen risiko telah dilakukan melalui pembahasan laporan profil risiko dan implementasi kebijakan manajemen risiko, serta penyampaian rekomendasi kepada Direksi dan Dewan Komisaris. - Penyusunan dan penyesuaian bobot pada parameter profil risiko dilakukan untuk membentuk skala prioritas pada setiap jenis risiko, sehingga pemantauan risiko menjadi lebih terfokus dan proporsional. - Pemberian rekomendasi perbaikan parameter pemantauan Risk Rank Operasional, guna meningkatkan deteksi risiko operasional di seluruh unit kerja. - Pemberian rekomendasi penyempurnaan parameter pemantauan RCSA, termasuk penyesuaian indikator risiko utama agar selaras dengan kondisi dan kompleksitas usaha. - Evaluasi pelaksanaan dan kesiapan BCP telah dilakukan, termasuk penilaian kecukupan skenario gangguan, kesiapan unit kerja terkait, serta rekomendasi peningkatan dokumentasi dan uji coba BCP secara berkala.
	Jumlah Rapat	:	2

3.	Komite Remunerasi dan Nominasi		
	Program	:	1. Pelatihan dan Pengembangan 2. Performance Management 3. Insentive dan Crash Program
	Realisasi	:	1. Pelatihan dan Pengembangan A. Akhir tahun 2025, jumlah pelaksanaan training adalah sebanyak 5613 peserta training, yang berarti per karyawan telah di training sebanyak 9x B. Program Training yang dijalankan adalah sebagai berikut : a) Training orientasi, b) Training karir (lbest Leadership Program) c) Training soft skill per jabatan (Leadership Journey Training) d) Training teknis per function

			(Business Academy) e) Training By TN 2. Performance Management a. Performance Management dijalankan dengan pengukuran KPI bulanan untuk karyawan cabang b. Untuk Karyawan Head Office pengukuran kinerja semester dilakukan melalui pengukuran KPI dari bulan Januari – Desember 2025. c. Hasil kinerja karyawan ini sejalan dengan kinerja organisasi dalam pencapaian target semester 2 2025 dan menjadi bahan evaluasi bagi pencapaian karir karyawan terkait, yang akan berdampak terhadap pencapaian insentif serta promosi karir karyawan 3. Insentive dan Crash Program Perusahaan membuat skema insentif dan crash program bulanan yang menggerakkan karyawan untuk bisa memberikan pencapaian terbaik yang diukur melalui KPI per jabatan.
	Jumlah Rapat	:	2

4. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

No	Nama	Keahlian	Jabatan di Komite	Pihak Independen
1.	Handoko Kuarso	Akuntansi	Ketua (Komite Audit) Ketua (Komite Remunerasi dan Nominasi)	iya
2.	Alkie Samuel Sutandra	Akuntansi	Anggota (Komite Audit) Anggota (Komite Pemantau Resiko)	iya
3.	Ong Tek Tjan	Akuntansi	Anggota (Komite Audit)	iya
4.	Rainald Okta Putra	Akuntansi	Ketua (Komite Pemantau Resiko)	iya
5.	Melvin Wangkar	Manajemen	Anggota (Komite Remunerasi dan Nominasi)	Tidak
6.	Viciania Dewi Kristiani	Manajemen	Anggota (Komite Remunerasi dan Nominasi)	iya
7.	Dimas Purwita Kamajaya	Manajemen	Ketua (Komite Manajemen Risiko)	iya
8.	Lukman Nelam	Manajemen	Anggota (Komite Manajemen Risiko)	iya
9.	Suhendra	Akuntansi	Anggota (Komite Manajemen Risiko)	iya
10.	Muhammad Akbar Baihaqi	Manajemen	Anggota (Komite Manajemen Risiko)	iya
Tindak Lanjut Rekomendasi Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite			:	Masing- masing di setiap komite akan menjalankan fungsinya dan melakukan rapat secara berkala.

5. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada BPR

1) Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Direksi	Nominal(Rp)	Persentase
1.	Andy	Rp. 201.300.000	0.2%
2.	Darwhin Sinarta	Rp. 0	0%
3.	Suhendra	Rp. 0	0%
4.	Jemmy ST	Rp. 0	0%
5.	Lukman Nelam	Rp. 0	0%
6.	Dimas Purwita Kamajaya	Rp. 0	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Salah satu anggota direksi memiliki saham di PT BPR Kredit Mandiri Indonesia			

2) Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Melvin Wangkar	Rp7.848.100.000	7.90%
2.	Handoko Kuarso	Rp0	0%
3.	Rainald Okta Putra	Rp0	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Salah satu Dewan Komisaris memiliki saham di BPR			

6. Kepemilikan Saham Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham pada Kelompok Usaha BPR

1) Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Kelompok Usaha BPR

No.	Nama Direksi	Sandi Bank Grup BPR	Nama Perusahaan dalam Grup BPR	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Andy	-	-	0%
2.	Darwhin Sinarta	-	-	0%
3.	Suhendra	-	-	0%
4.	Jemmy ST	-	-	0%
5.	Lukman Nelam	-	-	0%
6.	Dimas Purwita	-	-	0%

Penjelasan Lebih Lanjut :

Tidak ada anggota direksi BPR Kredit Mandiri Indonesia yang memiliki saham di kelompok usaha BPR

2) Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Kelompok Usaha BPR

No.	Nama Direksi	Sandi Bank Grup BPR	Nama Perusahaan dalam Grup BPR	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Melvin Wangkar	-	-	0%
2.	Handoko Kuarso	-	-	0%
3.	Rainald Okta Putra	-	-	0%

Penjelasan Lebih Lanjut :

BPR Kredit Mandiri Indonesia bukanlah perusahaan yang termasuk dalam grup BPR tertentu sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada anggota Dewan Komisaris yang memiliki saham di kelompok usaha BPR

7. Kepemilikan Saham Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham pada Perusahaan Lain

1) Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No.	Nama Direksi	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Lukman Nelam	-	Esta Kapital Fintek	1.00%
2.	Lukman Nelam	-	Esta Digital Niaga	0.62%
3.	Lukman Nelam	601698	PT. BPR Kredit Mandiri Kalsel	0.48%
4.	Lukman Nelam	600930	PT. BPR Kredit Mandiri Kalimantan Timur	1.00%
5.	Andy	601911	PT. BPR Kredit Mandiri Sulawesi Selatan Sejahtera	0.19%
6.	Andy	600930	PT. BPR Kredit Mandiri Kalimantan Timur	1.00%
7.	Andy	601698	PT. BPR Kredit Mandiri Kalsel	0.57%
8.	Darwhin Sinarta	600930	PT. BPR Kredit Mandiri Kalimantan Timur	0.75%
9.	Darwhin Sinarta	601698	PT. BPR Kredit Mandiri Kalsel	0.48%
10.	Suhendra	600930	PT. BPR Kredit Mandiri Kalimantan Timur	1.00%
11.	Suhendra	601698	PT. BPR Kredit Mandiri Kalsel	0.48%
12.	Jemmy ST	600930	PT. BPR Kredit Mandiri Kalimantan Timur	0.75%
13.	Jemmy ST	601698	PT. BPR BPR Kredit Mandiri Kalsel	0.48%

Penjelasan Lebih Lanjut :

Hanya satu anggota direksi yang tidak memiliki saham pada perusahaan lain.

2) Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No.	Nama Dewan Komisaris	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Melvin Wangkar	602660	PT BPR Kredit Mandiri Celebes Sejahtera	24.55%
2.	Melvin Wangkar	523	PT. Bank Sahabat Sampoerna	0.62%
3.	Melvin Wangkar	601911	PT. BPR Kredit Mandiri Sulawesi Selatan Sejahtera	6.67%
4.	Melvin Wangkar	600930	PT. BPR Kredit Mandiri Kalimantan Timur	6.95%
5.	Melvin Wangkar	601698	PT. BPR Kredit Mandiri Kalsel	7.23%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Salah satu dewan komisaris memiliki saham di perusahaan lain				

8. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/ atau Pemegang Saham

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Andy	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Darwhin Sinarta	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3.	Suhendra	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
4.	Jemmy ST	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
5.	Lukman Nelam	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
6.	Dimas Purwita Kamajaya	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Tidak ada hubungan keuangan anggota direksi pada BPR				

2. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	Melvin Wangkar	Tidak Ada	Tidak Ada	Yan Peter Wangkar - Orang Tua
2.	Handoko Kuarso	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
3.	Rainald Okta Putra	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Salah satu dewan komisaris memiliki hubungan keuangan dengan pemegang saham				

3. Hubungan Keuangan Pemegang Saham pada BPR

No	Nama Pemegang Saham BPR	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	Yan Peter Wangkar	Tidak Ada	Melvin Wangkar - Anak	Melvin Wangkar - Anak Melivia Wangkar - Anak
2.	Melvin Wangkar	Tidak Ada	Tidak Ada	Yan Peter Wangkar - Orang Tua Melivia Wangkar - Saudara Kandung
3.	Melivia Wangkar	Tidak Ada	Melvin Wangkar -- Saudara Kandung	Yan Peter Wangkar - Orang Tua Melivia Wangkar - Saudara Kandung
4.	Andy	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
1) Tidak ada hubungan keuangan anggota direksi pada BPR				
2) Salah satu dewan komisaris memiliki hubungan keuangan dengan pemegang saham				
3) Hanya salah satu pemegang saham yang tidak memiliki hubungan keuangan dengan Direksi, Komisaris,				

Pemegang Saham Lainnya

4. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Andy	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Darwhin Sinarta	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3.	Suhendra	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
4.	Jemmy ST	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
5.	Lukman Nelam	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
6.	Dimas Purwita Kamajaya	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Hubungan keluarga anggota direksi pada BPR tidak ada				

5. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	Melvin Wangkar	Tidak Ada	Tidak Ada	Yan Peter Wangkar - Orang Tua
2.	Handoko Kuarso	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
3.	Rainald Okta Putra	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Salah satu dewan komisaris memiliki hubungan keluarga dengan pemegang saham				

6. Hubungan Keluarga Pemegang Saham pada BPR

No	Nama Pemegang Saham BPR	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	Yan Peter Wangkar	Tidak Ada	Melvin Wangkar - Anak	Melvin Wangkar - Anak Melivia Wangkar - Anak
2.	Melvin Wangkar	Tidak Ada	Tidak Ada	Yan Peter Wangkar - Orang Tua Melivia Wangkar - Saudara Kandung
3.	Melivia Wangkar	Tidak Ada	Melvin Wangkar -- Saudara Kandung	Yan Peter Wangkar - Orang Tua Melivia Wangkar - Saudara Kandung
4.	Andy	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
1) Hubungan keluarga anggota direksi pada BPR tidak ada				
2) Salah satu dewan komisaris memiliki hubungan keluarga dengan pemegang saham				
3) Hanya satu Pemegang Saham yang tidak memiliki hubungan keluarga dengan Direksi, Komisaris, Pemegang Saham lainnya				

9. Paket/ Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

1. Paket/ Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No	Jenis Remunerasi (Dalam 6 Bulan)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	6	Rp.1.909.800.000	3	Rp.507.000.000
2	Tunjangan	0	Rp. 0	0	Rp. 0
3	Tantiem	6	Rp.1.440.000.000	3	Rp.400.000.000

4	Kompensasi berbasis saham	0	Rp. 0,00	0	Rp. 0,00
5	Remunerasi lainnya	0	Rp. 0,00	0	Rp. 0,00
Total			Rp. 3.349.800.000		Rp.907.000.000

2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 6 Bulan)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1	Perumahan	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Transportasi	Ada	Ada
3	Asuransi Kesehatan	Ada	Ada
4	Fasilitas lainnya	Tidak Ada	Tidak Ada
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Fasilitas bagi Direksi dan Dewan Komisaris adalah berupa transportasi mobil operasional dan asuransi kesehatan.			

10. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Keterangan	Perbandingan
	(a/b) :1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	26.6 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	3.7 : 1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	3.1 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi (b)	1.7 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang tertinggi (b)	2.2 : 1
Penjelasan Lebih Lanjut :	
Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah BPR Kredit Mandiri Indonesia dinilai wajar	

11. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris dalam Semester 2 (dua) Tahun 2025

Pelaksanaan Rapat dalam Semester 2 (dua) Tahun 2025

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	08 September 2025	3	a. Total Aset (dalam ribuan) Total aset menunjukkan tren pertumbuhan positif selama Juni–Agustus 2025. Kenaikan kumulatif Juni–Agustus sebesar Rp8.190.548 ($\pm 1,15\%$). b. Aset Kredit (dalam ribuan) Aset kredit relatif stabil dengan fluktuasi kecil. Posisi Agustus masih lebih tinggi dibandingkan Juni dengan kenaikan Rp2.044.365 ($\pm 0,39\%$) c. Dana Pihak Ketiga (DPK) (dalam ribuan) Dana pihak ketiga mengalami pertumbuhan positif dan stabil. Kenaikan kumulatif Juni–Agustus sebesar Rp12.941.092 ($\pm 2,30\%$). Hal ini mencerminkan kinerja penghimpunan dana yang cukup baik I. Kinerja Bisnis a. Lending Pencapaian lending menunjukkan pertumbuhan berkelanjutan, Kenaikan kumulatif Juni vs Agustus sebesar Rp1.945 juta ($\pm 10,58\%$) b. NPL NPL relatif terkendali dan posisi Agustus masih lebih baik dibandingkan Juni, menunjukkan perbaikan kualitas kredit Kesimpulan dan Arahkan 1. Kinerja keuangan secara umum menunjukkan tren pertumbuhan yang positif, baik dari sisi aset, aset kredit, maupun dana pihak ketiga. 2. Penyaluran kredit perlu terus dioptimalkan agar pertumbuhan aset dapat terus terjaga, dengan tetap memperhatikan kualitas kredit. 3. Pengendalian NPL harus terus ditingkatkan agar tetap berada pada level yang sehat dan sesuai ketentuan. 4. Manajemen diminta tetap konsisten menjalankan strategi bisnis sesuai Rencana Bisnis BPR (RBB) serta memperhatikan penerapan tata kelola dan manajemen risiko.

		II. Evaluasi Kinerja Keuangan November 2025 a. Total Aset (dalam ribuan) Total aset menunjukkan pertumbuhan yang konsisten selama periode September hingga November 2025. Aset meningkat dari Rp732.005.536 pada September menjadi Rp750.428.711 pada November, dengan kenaikan kumulatif sebesar Rp18.423.175 atau sekitar 2,52%. b. Aset Kredit (dalam ribuan) Aset kredit mengalami pertumbuhan yang berkelanjutan. Nilai aset kredit meningkat dari Rp529.448.185 pada September menjadi Rp543.441.510 pada November, dengan kenaikan kumulatif sebesar Rp13.993.325 atau sekitar 2,64%. c. Dana Pihak Ketiga (DPK) (dalam ribuan) Dana pihak ketiga menunjukkan tren pertumbuhan positif. Total DPK meningkat dari Rp586.938.756 pada September menjadi Rp608.271.172 pada November. Kenaikan ini terutama didorong oleh peningkatan pinjaman diterima dan tabungan, dengan kenaikan kumulatif sebesar Rp21.332.416 atau sekitar 3,63%. III. Kinerja Bisnis a. Lending Pencapaian lending pada September sebesar Rp18.591 juta, meningkat signifikan pada Oktober menjadi Rp21.523 juta, dan sedikit menurun pada November menjadi Rp20.673 juta. Secara keseluruhan, lending masih menunjukkan pertumbuhan positif dengan kenaikan bersih sebesar Rp2.082 juta atau sekitar 11,20% dibandingkan September. b. NPL Rasio NPL menunjukkan perbaikan. NPL tercatat sebesar 6,43% pada September, relatif stabil di Oktober sebesar 6,45%, dan menurun menjadi 6,18% pada November. Penurunan ini mencerminkan perbaikan kualitas kredit dan pengelolaan risiko yang lebih baik. IV. APU-PPT Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Peraturan OJK Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan (POJK APU/PPT
--	--	---

2.	09 Desember 2025	3	dan PPPSPM) yang mengatur antara lain: 1. PT BPR Kredit Mandiri Indonesia melakukan penilaian, kebijakan dan prosedur, serta mitigasi risiko PPSPM termasuk mitigasi risiko penghindaran sanksi (<i>sanction evasion</i>); 2. Kewajiban identifikasi, pemblokiran serta merta, dan penyampaian laporan tindak lanjut atas daftar PPSPM kepada PPATK dan tembusan kepada OJK dengan rincian: a) Tembusan laporan disertai berita acara Pemblokiran secara serta merta paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak PT BPR Kredit Mandiri Indonesia menerima Daftar PPSPM; dan b) Tembusan laporan nihil paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak PT BPR Kredit Mandiri Indonesia menerima daftar PPSPM. Proses pencucian uang dapat dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) tahap kegiatan yang meliputi : 1. Penempatan (<i>Placement</i>) 2. Transfer (<i>Layering</i>) 3. Penggunaan Harta Kekayaan (<i>Integration</i>) Pendanaan terorisme adalah penggunaan harta kekayaan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme. Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal adalah penyebaran senjata nuklir, biologi, dan kimia. Sebagai langkah mitigasi risiko serta sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku di lembaga keuangan atau perbankan, khususnya di PT BPR Kredit Mandiri Indonesia yang sangat rentan untuk digunakan sebagai media pencucian uang, pendanaan terorisme dan pencegahan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal. Maka dengan ini PT. BPR Kredit Mandiri Indonesia menerapkan Program APU-PPT dan PPSPM. Program APU-PPT dan PPSPM yang merupakan bagian dari penerapan prinsip kehati-hatian manajemen risiko yang mencakup sebagai berikut : a. Tanggung jawab dan pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris b. Kebijakan dan prosedur c. Pengendalian intern d. Sistem manajemen informasi dan e. Sumber daya manusia dan pelatihan. Kebijakan dan prosedur mencakup sebagai berikut : a. Permintaan informasi dan dokumen b. Beneficial Owner c. Verifikasi dokumen d. CDD e. Penutupan hubungan dan penolakan transaksi f. Ketentuan mengenai area berisiko tinggi dan PEP g. Pelaksanaan CDD oleh pihak ketiga h. Pengkinian dan pemantauan i. Transfer dana j. Penatausahaan dokumen Pelaporan kepada PPATK, Kepolisian dan OJKManajemen
----	------------------	---	--

Seluruh anggota Dewan Komisaris hadir dalam rapat

12. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No	Nama Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1.	Melvin Wangkar	2	0	100%
2.	Handoko Kuarso	2	0	100%
3.	Rainald Okta Putra	2	0	100%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Seluruh anggota Dewan Komisaris hadir dalam rapat				

13. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 6 Bulan)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelum nya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelum nya	Tahun Laporan	Tahun Sebelum nya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	4	6	14	15
Telah Diselesaikan		0		0	4	6	14	15
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0	0	0	0	0
Penjelasan Lebih Lanjut :								
Jumlah Penyimpangan Internal Semester 2 (dua) Tahun 2025 :								
1. Tahun Sebelum nya total Fraud di Pegawai tetap ada 4 dan telah selesai. Tahun laporan total Fraud di Pegawai tetap ada 6 dan telah selesai.								
2. Tahun Sebelum nya total Fraud di Pegawai tidak tetap ada 14 dan telah selesai. Tahun laporan total Fraud di Pegawai tidak tetap ada 15 dan telah selesai.								

14. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai	3	2
Dalam Proses Penyelesaian	3	3
Total	6	5
Penjelasan Lebih Lanjut :		
Permasalahan Hukum yang Dihadapi Semester 2 (dua) Tahun 2025 : 1. Perdata total 6 yang telah selesai 3 dan dalam proses penyelesaian 3. 2. Pidana total 5 yang telah selesai 2 dan dalam proses penyelesaian 3.		

15. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

No	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan			Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			
1.	Melvin Wangkar	Komisaris Utama	Suhendra	Direktur	Sewa Ruko	75 juta rupiah	Plaza Sudirman Center Blok A.12 .Jl raya Sudirman Desa Pucung Kec. Kota Baru, Karawang
2.	Yeti Sopandi	Istri Pemilik	Suhendra	Direktur	Sewa Ruko	106 juta rupiah	Jl. Letjend Ibrahim Adji No. 159 Loji – Bogor
3.	Melvin Wangkar & Melivia Wangkar	Komisaris Utama & Anak Pemilik	Suhendra	Direktur	Sewa Ruko	106 juta rupiah	Jl. Major Oking No.5 Kel. Puspanega Kec. Citeureup Bogor
4.	Melvin Wangkar	Komisaris Utama	Suhendra	Direktur	Sewa Ruko	90 juta rupiah	Jl. Terusan Kopo No. 341 D RT. 004 RW. 004 Kel. Margahayu Selatan Bandung
5.	Melvin Wangkar	Komisaris Utama	Suhendra	Direktur	Sewa Kendaraan	206 juta rupiah	Sewa Kendaraan Operasional Kantor
Penjelasan Lebih Lanjut :							
Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan Semester 2 (dua) Tahun 2025 : 1. Sewa Ruko berjumlah 4 2. Sewa Kendaraan sebesar Rp. 206 Juta							

16. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerimaan Dana	Jumlah (Rp)
1.	10 Desember 2025	Sosial	Penanaman Mangrove	KMPH Mangrovesari bersama Tim KAJ (Keuskupan Agung Jakarta)	Rp3.570.575,-
Penjelasan Lebih Lanjut Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik					
Pemberian dana untuk kegiatan sosial di lingkungan masyarakat sekitar per Semester 2 (dua) Tahun 2025 : Kegiatan Penanaman Mangrove di KMPH Mangrovesari bersama Tim KAJ (Keuskupan Agung Jakarta)					

Tangerang Selatan, 29 Januari 2026
PT. BPR KREDIT MANDIRI INDONESIA

Disetujui Oleh



Andy
Direktur Utama



Melvin Wangkar
Komisaris Utama

**LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENANDATANGANAN LAPORAN HASIL
PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA**

Dengan ini kami menyatakan bahwa:

Laporan Hasil Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola Semester 2 Tahun 2025 PT. BPR KREDIT
MANDIRI INDONESIA

Telah disusun sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai berikut:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 9 Tahun 2024 tanggal 1 Juli 2024 Tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
2. Surat Edaran OJK (SEOJK) Nomor 12/SEOJK.03/2024 tanggal 18 Oktober 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat

Demikian Laporan ini dibuat yang menjadi gambaran umum penerapan Tata Kelola PT. BPR KREDIT MANDIRI INDONESIA Semester 2 Tahun 2025. Penerapan Tata Kelola BPR yang baik diharapkan dapat mendorong kinerja perusahaan, melindungi kepentingan pemangku kepentingan (stakeholders) dan meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku umum di industri Bank Perekonomian Rakyat (BPR).

Tangerang Selatan, 29 Januari 2026

PT. BPR KREDIT MANDIRI INDONESIA



Andy
Direktur Utama



Melvin Wangkar
Komisaris Utama